INDO POS

Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sept | Okt | Nov | Des | 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Realisasi APBD Molor, Rakyat Jadi Korban

MANTAN Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengomentari soal perseteruan antara Gubernur Ahok dengan DPRD DKI Jakarta sebagai buntut dari tarik menarik kepentingan anggaran. Pasalnya, perseteruan berdampak dengan realisasi anggaran. "Molornya APBD 2015 berakibat rakyat tidak segera bisa menikmati pembangunan dan gaji PNS dan Non PNS di Pemprov DKIpun terlambat," ujar Prijanto pada INDOPOS, kemarin (16/2).

Prijanto menegaskan, kepedulian pimpinan terhadap pegawai bisa diwujudkan dengan menghindari keterlambatan realisasi anggaran. Agar gaji pegawai tidak terlambat, ada sistem administrasi penyelesaian yang sederhana antara Gubernur, DPRD dan Kemendagri. "Disinilah perlunya gubernur membuat terobosan," tutur Prijanto.

Pengembalian Rancangan APBD oleh Kemendagri karena persoalan format tidak sesuai aturan. Hal ini dianggap Prijanto sebagai sesuatu yang aneh lantaran kalangan birokrasi tidak mungkin salah format. Sebab penyusunan anggaran dilaksanakan rutin setiap tahun. Sehingga wajar bila terdapat anggapan bahwa gubernur memiliki tim siluman (dari luar PNS) yang menyusun anggaran.

"Pertanyaan nakal mulai muncul dipikiran rakyat kecil, adakah tim siluman penyusunnya? Sesungguhnya, mengelola uang rakyat yang diwujudkan dalam APBD itu harus transparan dan taat azas. Jika transparan, tentu tidak akan muncul istilah 'dana siluman' dan 'tim siluman', kata Prijanto.

Dalam menyusunan APBD, sambung Prijanto, sebaiknya dengan membuang jauh sifat arogansi dan pikiran sektoral. Gubernur tidak bisa mengabaikan dewan. Sebab dewan adalah bagian dari pemerintahan Daerah. "Di sisi lain, konsep RAPBD dari eksekutif belum tentu betul. Sangatlah tidak elok dilihat dan didengar rakyat ada perseteruan sengit," tandas dia.

Disayangkan lagi bila perseteruan disebabkan ketidaktransparanan dalam mengelola uang rakyat. Padahal e-budgeting hanyalah sistem yang dipilih, bukan ayat-ayat kitab suci yang tidak bisa diubah. "Semoga semua tetap mengacu kepada ayat-ayat konstitusi, sebagaimana yang sering dilontarkan Pak Ahok sewaktu menjabat wagub," tukas Prijanto. **(wok)**